

**PRINSIP TIDAK DIGANGGUGUGATNYA GEDUNG PERWAKILAN
DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(Studi tentang Pengeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad,
Pakistan pada 1973)**

**Oleh:
Nabila Fitriachra
E1A017351**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961, gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima. Dalam praktiknya, terkadang terjadi pelanggaran Konvensi tersebut khususnya mengenai penyalahgunaan gedung perwakilan diplomatik, salah satunya adalah kasus pengeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad, Pakistan pada 1973. Kasus ini berawal dari penyelundupan senjata dan bahan peledak ke dalam gedung perwakilan Irak di Islamabad yang menyebabkan gedung perwakilan tersebut digeledah oleh aparat keamanan Pakistan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip tidak diganggu gugatnya perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan menganalisis kasus pengeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad oleh aparat keamanan negara Pakistan menurut hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif-kualitatif.

Berdasarkan penelitian, Pakistan tidak melanggar prinsip inviolabilitas gedung perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961. Perbuatan Irak menyelundupkan senjata dan bahan peledak ke dalam gedung perwakilannya di Islamabad, menyebabkan aparat keamanan Pakistan menggeledah gedung perwakilan tersebut. Pengeledahan dilakukan karena gedung perwakilan digunakan negara pengirim untuk kegiatan yang bertentangan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas perwakilan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan untuk tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi atau oleh peraturan hukum internasional lain atau oleh perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Kata kunci: Prinsip tidak diganggu gugat, gedung perwakilan diplomatik, Konvensi Wina 1961.

**THE PRINCIPLE OF INVIOABILITY OF THE DIPLOMATIC PREMISES
BASED ON INTERNATIONAL LAW**

(Study of Pakistani Search to Iraqi Embassy in Islamabad, Pakistan 1973)

**Written by:
Nabila Fitriachra
E1A017351**

ABSTRACT

Based on Article 22 paragraph (1) Vienna Convention 1961, diplomatic premises are inviolable. In practice, sometimes there are violations of the convention particularly the misuse of the diplomatic premises, for example, is searching on the Iraqi embassy in Islamabad 1973. This case began with the weapons and explosives smuggled into the Iraqi embassy in Islamabad, Pakistan which caused the Pakistani security forces to conduct a raid on the embassy building.

This study aims to determine the principle of the inviolability of the diplomatic premises based on the Vienna Convention 1961 and to analyze the case of a raid on the Iraqi embassy in Islamabad 1973 based on international law. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data analysis in this study used a normative-qualitative data analysis method.

Based on the research, Pakistan was not violating the principle of the inviolability of the diplomatic premises regulated on Article 22 Vienna Convention 1961. Iraq smuggled weapons and explosives into its embassy in Islamabad, causing Pakistani security forces to raid the building. The raid was carried out because of the diplomatic premise used for an activity which contrary to the functions of the diplomatic premises as regulated in Article 41 paragraph (3) Vienna Convention 1961 which explain the embassy must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Keyword: The principal of the inviolability, diplomatic premises, Vienna Convention 1961.